

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *adaptive governance* dalam pengembangan wisata budaya di Desa Danau Lamo Kabupaten Muaro Jambi masih belum berjalan secara maksimal. Secara kelembagaan, belum terbentuk sistem polisentris dan berlapis yang efektif. Pemerintah desa, dinas pariwisata, serta komunitas lokal belum mampu membangun sinergi yang kuat dalam pengelolaan wisata budaya. Meskipun terdapat komunitas seperti Mahligai Budaya yang aktif dalam pelestarian budaya, peran mereka belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah maupun aktor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola yang adaptif belum terwujud secara menyeluruh.

Dari sisi partisipasi dan kolaborasi, keterlibatan masyarakat masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi ke dalam kebijakan maupun program wisata desa secara strategis. Kolaborasi antara pemangku kepentingan juga cenderung lemah, baik secara horizontal antar komunitas, maupun secara vertikal antara desa dan pemerintah daerah. Selain itu, organisasi mandiri dan jaringan kerja belum dikembangkan secara optimal, sehingga inovasi dan proses pembelajaran dalam pengelolaan budaya serta pelayanan wisata cenderung stagnan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan kurangnya fasilitasi dari pihak luar memperparah situasi ini.

Adapun dalam mendukung promosi wisata, upaya *adaptive governance* masih menghadapi berbagai kendala. Penggunaan media digital, khususnya media

sosial, belum dikelola secara profesional karena ketiadaan tim khusus, keterbatasan anggaran, serta rendahnya literasi digital perangkat desa. Promosi wisata masih dilakukan secara sukarela dan belum memanfaatkan potensi generasi muda serta kolaborasi lintas sektor secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi promosi yang lebih adaptif, partisipatif, dan inovatif, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa agar pengembangan wisata budaya di Desa Danau Lamo dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Danau Lamo bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi perlu membentuk struktur kelembagaan yang lebih jelas dan terintegrasi dalam pengelolaan wisata budaya.
2. Pemerintah dan lembaga terkait memperkuat kapasitas organisasi lokal melalui pelatihan manajemen, jejaring kemitraan, dan pendanaan. Dukungan terhadap organisasi budaya lokal akan membantu keberlanjutan kegiatan wisata budaya yang bersifat mandiri dan berbasis komunitas.
3. Pemerintah Desa perlu membentuk tim khusus atau menggandeng pihak eksternal yang kompeten dalam bidang digital marketing untuk mendukung promosi wisata berbasis media sosial. Selain itu, dokumentasi dan pengarsipan digital terhadap aset budaya perlu dimulai sebagai bagian dari inovasi promosi dan pelestarian.
4. Mengingat pentingnya promosi berbasis digital, penelitian lanjutan dapat secara khusus fokus pada inovasi digital dan teknologi informasi dalam pelestarian budaya dan promosi wisata. Termasuk menilai efektivitas penggunaan media sosial, platform *E-tourism*, atau aplikasi berbasis komunitas.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan pengembangan wisata budaya di Desa Danau Lamo dapat berjalan lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian budaya daerah.